



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692047/2026**

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (135) | KEMENTERIAN HUKUM |
| 2. Unit Organisasi | : | (04) | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM |
| 3. Provinsi | : | (05) | JAWA TIMUR |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (692047) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR |
| Sebesar | : | Rp. 3.661.359.000 | (TIGA MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	3.661.359.000
135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.	3.661.359.000

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 3.661.359.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|---------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN SURABAYA II | (135) Rp. | 3.661.359.000 |
|---------------------|-----------|---------------|

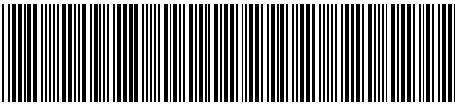
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3097-3444-1813-7541

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692047) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							3.661.359.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah							3.661.359.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya				4,00	layanan	1.244.087.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				4.00	layanan	1.244.087.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga				1,00	Perkara	45.936.000
Rincian Output	:	01	BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah				1.00	Perkara	45.936.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				24,00	Lembaga	2.300.840.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah				24.00	Lembaga	2.300.840.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				1,00	Laporan, Layanan	70.496.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah				1.00	Laporan	70.496.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026
I B. SUMBER DANA



Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692047) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	3.661.359.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

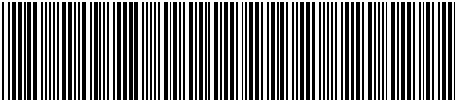
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692047) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692047	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR	-	3.661.359	-	-	-	3.661.359	05 . 51	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	3.661.359	-	-	-	3.661.359		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	3.661.359	-	-	-	3.661.359		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	1.244.087	-	-	-	1.244.087		
04	PNBP	-	1.244.087	-	-	-	1.244.087		
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	45.936	-	-	-	45.936		
04	PNBP	-	45.936	-	-	-	45.936		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	2.300.840	-	-	-	2.300.840		
04	PNBP	-	2.300.840	-	-	-	2.300.840		
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	70.496	-	-	-	70.496	05 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3097-3444-1813-7541

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (692047) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

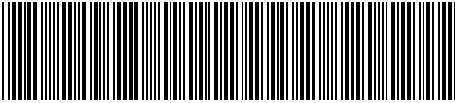
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
04	PNBP	-	70.496	-	-	-	70.496	135@	
JUMLAH		-	3.661.359	-	-	-	3.661.359		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



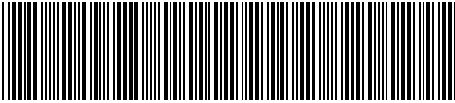
DS:3097-3444-1813-7541

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692047) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692047	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	29.721	860.632	33.955	213.665	748.215	104.064	106.558	708.215	49.267	807.066	3.661.359
		BELANJA BARANG	0	0	29.721	860.632	33.955	213.665	748.215	104.064	106.558	708.215	49.267	807.066	3.661.359
		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	0	29.721	860.632	33.955	213.665	748.215	104.064	106.558	708.215	49.267	807.066	3.661.359
	135.04.BF.7110	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	29.721	860.632	33.955	213.665	748.215	104.064	106.558	708.215	49.267	807.066	3.661.359

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026
IV A. B L O K I R



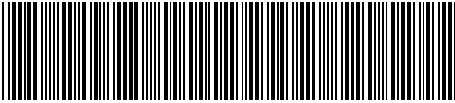
DS:3097-3444-1813-7541

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [692047] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692047	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR		Halaman IV.A DIPA (Blokir)
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.568.112	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 1.568.112	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 130.479
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.503		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.474
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.600	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.406
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Halaman IV.A DIPA (Blokir)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.500	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Halaman IV.A DIPA (Blokir)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 672
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Halaman IV.A DIPA (Blokir)
522141	Belanja Sewa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.211	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	521211	Belanja Bahan(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.590
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)		Halaman IV.A DIPA (Blokir)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.610	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 974.700
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		Halaman IV.A DIPA (Blokir)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 158.400	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026
IV A. B L O K I R



DS:3097-3444-1813-7541

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [692047] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

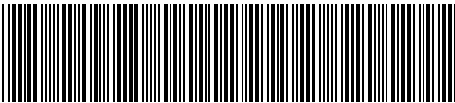
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7110.FAE	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.652 Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 64.233 Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.360 Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.722 Halaman IV.A DIPA (Blokir)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692047/2026
IV B. C A T A T A N



DS:3097-3444-1813-7541

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [692047] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO